

**LOKAKARYA DAN TEMU NASIONAL
BEM UPN "VETERAN" SE INDONESIA**



**Peran Agama Dalam
Konflik Multidimensional
di Era Reformasi**

YOGYAKARTA, 7 AGUSTUS 2002

AGAMA DAN KONFLIK MULTIDIMENSIONAL: Adakah Peran Agama untuk Mengatasinya?

oleh
Franz Magnis-Suseno SJ

PENGANTAR

Seharusnya agama-agama bersama-sama mengembangkan sinergi yang mendukung usaha bangsa Indonesia untuk ke luar dari krisisny. Akan tetapi, dalam kenyataan situasi tidak demikian.

Memandang situasi bangsa Indonesia, di ambang milenium ketiga, banyak orang merasa cemas. Tingkat kekerasan dalam masyarakat yang selalu sudah cukup tinggi, dalam tahun 1998 mencapai puncak baru. Jumlah, ganasnya dan luasnya segala macam kerusuhan, perampasan, penjarahan dan tindak kriminal lain, serta jumlah kematian akibat kejadian-kejadian itu sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Seakan-akan sendi-sendi yang mempersatukan segala komponen kemajemukan Nusantara yang bersama-sama mewujudkan

bangsa Indonesia mulai lepas. Belum pernah dalam sejarahnya bangsa Indonesia berhadapan dengan ancaman disintegrasi sedemikian serius seperti sekarang.

Ada kenyataan yang menyedihkan: Di dalam konflik-konflik itu umat beragama pun terlibat. Kalau pun betul bahwa semua konflik itu bersifat komunal dan tidak primer religius¹, lagi pula latar belakang itu kompleks dan banyak kepentingan ikut main yang hanya memanfaatkan simbol-simbol keagamaan, namun kenyataan bahwa terjadi tindak kekerasan antar umat beragama tetap sangat menyedihkan.

Maka meskipun bukan ajaran agama-agama yang harus dipersalahkan, namun kenyataan tidak dapat disangkal bahwa perbedaan agama dalam kenyataan menjadi salah satu unsur yang rawan konflik. Maka agama-agama – lebih tepat: kaum beragama, dan terutama para tokoh, pimpinan dan pautan agama – tidak dapat lepas dari tanggungjawab atas situasi di negara ini. Pada pundak mereka terletak tanggung-

¹ "Komunal" berarti: Masyarakat semakin terpecah-belah dalam komunitas-komunitas baik primordial (suku, agama, daerah, bahasa dsb.) maupun lokal (kampung, RT/RW) dan sosial ("uruk, sopir/kondektur", tukang parkir, pedagang di kaki lima). Setiap konflik melibatkan komunitas. Masing-masing komunitas mempertahankan kesatuannya dengan menutup diri terhadap komunitas lain: mencurigai, mengiri, memusuhi dsb. Agama dilibatkan bukan karena ajaran agama itu sendiri, melainkan karena termasuk identitas komunitas itu. Bisa "kampung Melayu" bermusuhan dengan "kampung Madura" (dua-duanya sama agamanya), bisa "kampung Kristen" bermusuhan dengan "kampung Musahlim".

jawab berat untuk bukan hanya tidak mengancam keutuhan bangsa, melainkan menjadi pendukung positif.

Dalam makalah ini saya akan (1) mengajukan anggapan bahwa situasi konflik sekarang tidak dapat dimengerti dari kekhasan masing-masing agama maupun umat beragama, melainkan harus dipahami sebagai konflik komunalistik, (2) menegaskan bahwa agama-agama tidak dapat cuci tangan, (3) mengajukan keyakinan saya bahwa beragama di masa kini hanya bermutu apabila berperikemanusiaan, dan (4) menawarkan beberapa catatan tentang perubahan-perubahan yang perlu dilakukan oleh umat-umat beragama sendiri kalau betul-betul mau bertanggungjawab atas keutuhan bangsa.

1. MEREBAKNYA KOMUNALISME

Pertama, melawan anggapan bahwa konflik-konflik antar umat beragama harus dimengerti dari ciri khas agama-agama mereka itu, berikut ini saya mau menegaskan bahwa hakekat konflik-konflik horisontal yang kita alami di Indonesia sekarang, bersifat komunalistik.

Kita sebaiknya bertolak dari kenyataan yang sangat mencolok: Masyarakat penuh kekerasan. Kekerasan di jalan raya, di pasar-pasar, di kampung-kampung, di desa-desa terpencil. Masyarakat mudah rusuh. Ada penyerangan terhadap kantor

polisi atau gedung-gedung pemerintah daerah. Aparat pun di satu pihak tidak berani melawan masa (kecuali mahasiswa), di lain pihak terlibat dalam kekerasan itu sendiri. Bahkan kekerasan aparat sudah berlangsung lama dan dirasakan oleh masyarakat, tetapi baru sesudah reformasi dapat dibicarakan: Kekerasan di bekas Timor Timur, Aceh, Papua, peristiwa brutal seperti Tanjung Priok, Lampung dan Dili, peristiwa pembunuhan Marsinah dan Udin (yang sampai hari ini belumuntas diusut). Masyarakat juga rusuh sendiri, misalnya para fan klub sepak bola, penjarahan massal terhadap perkebunan, tanaman palawija milik orang kota, empang udang dsb. Begitu pula tawuran yang semakin menjadi antara kampung-kampung dan desa-desa yang bertetangga.

Masyarakat mudah dihasut dan direkayasa dan mudah rusuh. Bangsa Indonesia tersebar atas ribuan pulau dan terdiri atas *lapisan atas* yang menikmati buah-buah pembangunan Orde Baru, dan *lapisan menengah ke bawah* yang hanya mencicipinya, bahkan sering menjadi kurban pembangunan. Lalu atas ratusan suku dan budaya yang menganut beberapa agama, ada perbedaan antara penduduk aseli dan pendatang, ada perbedaan ras, ada ketengangan antara Jawa dan pulau-pulau lain, ada dominasi budaya Jawa dalam politik di atas budaya-budaya lain dlsb. Kesannya sekarang titik-titik sambung keanekaan unsur bangsa ini mulai retak. Maka alasan seder-

hana pun, apalagi hasutan dan rekayasa yang canggih, mudah dapat menimbulkan konflik antara unsur-unsur itu. Apakah lalu suku, atau agama, atau ras, atau perasaan "orang kecil" yang "tidak ikut memiliki" hasil pembangunan, atau sentimen penduduk asli terhadap para pendatang atau sebaliknya yang menjadi warna sebuah ledakan adalah sangat sekunder dan tergantung dari konteks konkret.

Oleh karena itu salahlah kalau kita bicara tentang "masalah agama" dalam kaitan dengan konflik-konflik antara umat-umat beragama itu. Seperti sudah disebutkan di atas, dalam kenyataan di kebanyakan kampung dan desa orang-orang dari suku, agama dan ras yang berbeda tetap hidup bersama dengan damai dan juga ingin hidup bersama dengan baik. Yang rawan adalah bahwa perdamaian itu mudah terganggu oleh alasan-alasan yang sepele, tetapi yang dalam salah satu arti bersifat "politis". Konflik-konflik itu tidak bersifat religius dan juga tidak ideologis (lain hal apakah ada perekayasa yang termotivasi ideologis), melainkan *komunalistik*. Dengan "komunalistik" di sini dimaksud suatu gejala sosio-psikologis, yaitu bahwa orang semakin tidak mampu menghayati diri sebagai "kita saudara sebangsa" atau "kita sama-sama manusia", melainkan mereka menghayati diri sebagai "kami" yang berhadapan dengan "mereka". "Mereka" itu adalah "yang lain", bisa yang dari suku lain, agama lain, ras lain, golongan sosial

lain, asal usul lain. Penyempitan kemampuan untuk menghayati diri secara inklusif itu semakin menjadi-jadi. "Kami" menjadi semakin sempit, "mereka" semakin luas. "Mereka" lalu menjadi outsider, terhadapnya "kami" merasa acuh tak acuh, mudah curiga dan berprasangka, lalu barangkali takut, akhirnya mudah dihasut untuk menyerang simbol-simbol "mereka" itu.

Apa yang menjadi dasar merebaknya komunalisme yang kalau menjadi-jadi betul-betul mengancam kesatuan bangsa itu? Jelaslah bahwa ajaran dan teologi agama-agama tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Dasar gejala berbahaya itu tentu suatu disintegrasi sosial menyeluruh yang dialami bangsa kita. Kiranya adalah tiga lingkaran yang relevan untuk diperhatikan.

(1) Yang pertama adalah sebuah gejala kultural menyeluruh yang dialami oleh banyak bangsa di bumi kita sekarang. Masyarakat Indonesia sedang berada di tengah-tengah proses transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat pasca-tradisional. Bagi kelas-kelas menengah ke atas transformasi itu membuka cakrawala dan kesempatan yang baru untuk mengekspresikan diri dan oleh karena itu umumnya dihayati secara positif, bahkan antusias. Tetapi massa masyarakat terutama menghayati segi-segi negatif perubahan men-

dalam ini: Disorientasi karena nilai-nilai tradisional seakan-akan tidak terpakai lagi. Ancaman atas identitas, bahkan penghidupan mereka. Mobilitas baru dan perubahan dalam susunan hirarkis tradisional antar golongan dan kelompok yang mengancam juga. Dalam situasi ini primordialisme, dengan berbalik ke eksklusivitas kelompok semula, dengan sekaligus mencurigai "mereka" yang "mengancam" di luar, merupakan salah satu opsi.

(2) Gejala itu menjadi rawan karena ketertutupan sistem kekuasaan selama Orde Baru. Ruang politik (political space) ditutup, masyarakat menjadi objek pengaturan dari atas. Apabila terjadi konflik antar masyarakat sendiri atau dengan pemerintah -yang melalui lurah terwakili sampai ke tengah-tengah desa- konflik itu tidak dipecahkan secara rasional, argumentatif dan diskursif, melainkan dengan tekanan dan ancaman. Di mana ancaman paling kotor yang dipakai, dan memang merupakan ancaman, adalah "kamu PKI!" dan "kamu ekstrem kanan!". Sering masyarakat merasa menjadi korban pembangunan. Maka perasaan kecewa, sakit hati, dan perasaan diperlakukan dengan tidak adil terus terakumulasi dalam hati rakyat dan mudah menghasilkan perasaan curiga, iri dan dendam. Ketidakpercayaan sama sekali rakyat kepada aparat pemerintah, kecenderungan untuk memakai kekerasan untuk mencapai apa yang hak mereka, dan kesediaan untuk menja-

rah atau merusak apa yang termasuk "dunia sana", "dunia pembangunan" adalah buah kegagalan pengelolaan konflik selama Orde Baru.

(3) Sesudah Pak Harto berhenti dan diganti dengan pemerintah yang lemah, bersamaan dengan angkatan bersenjata yang bingung dan tidak percaya diri, segala frustrasi dan kekecewaan rakyat ini dapat muncul ke permukaan. Tanda-tanda disintegrasi sosial dan keambrokan the rule of law yang kita saksikan sekarang adalah akibat sejarah puluhan tahun kekerasan struktural itu.

Maka dari itu juga jelas bahwa ancaman disintegrasi yang dialami oleh bangsa Indonesia merupakan masalah menyeluruh. Bangsa Indonesia sedang sakit dan yang diperlukan adalah penyembuhan yang menyeluruh. Pemerintah harus menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan masyarakat sendiri memulai proses-proses ke arah penyembuhan.²

² Tindakan-tindakan seperti itu adalah:

1. Menetapkan kembali kekuatan hukum (the rule of law) di mana segenap pelanggaran undang-undang, baik individual maupun masal, selalu ditindak dengan tegas dan tak pernah dibiarkan. Di sini termasuk pengembalian perangkat yudikatif (kehakiman, pengadilan) yang bersih dan kompeten.
2. Membangun angkatan kepolisian dan angkatan bersenjata yang kompeten, profesional, tahu diri, bersemangat demokratis, tidak korup, tidak lagi terlibat premanisme, disiplin, bersemangat nasionalis.

2. TANGGUNGJAWAB KAUM AGAMA DI NEGERI INI

Namun, para agamawan tidak dapat cuci tangan dan menyerahkan seluruh tanggungjawab atas penyembuhan luka-luka masyarakat kepada pemerintah. Bukan hanya karena agama memang unsur yang amat penting dalam kehidupan bangsa dan karena itu para pimpinan, tokoh dan panutan agama sudah jelas memikul tanggungjawab berat atas penciptaan suasana damai dan kebaikan di antara umat-umat beragama. Melainkan karena agama-agama, artinya para tokoh, guru, panutan agama dan juga umat biasa terlibat dalam penciptaan suasana permusuhan. Akan berarti menutup mata kalau kita tidak mau melihat berapa banyak darah sudah dicurahkan

-
3. Menciptakan kondisi-kondisi penyehatan kehidupan ekonomis dan mengarahkan pembangunan ekonomis yang oleh seluruh rakyat dapat dirasakan sebagai adil.
 4. Bersama DPR dan MPR membangun kehidupan demokratis, termasuk mengembangkan sebuah budaya konflik dan sopan-santun demokratis.
 5. Menegaskan secara meyakinkan bahwa segenap warga bangsa sama-sama menikmati kewajiban dan hak-hak sebagai warga negara dan manusia, jadi bahwa negara Indonesia adalah milih seluruh bangsa tanpa membedakan suku, agama, daerah dlsb.
 6. Melaksanakan desentralisasi pelaksanaan kekuasaan secara tertib dan profesional yang di satu pihak memberikan otonomi yang wajar kepada masing-masing satuan sosial-politik bangsa, di lain pihak menjamin persatuan dan sendi-sendi kehidupan bersama, atas dasar Pancasila.
 7. Kecuali itu, pemerintah harus memelopori pembaruan masyarakat dengan memancarkan visi positif tentang masa depan bangsa ke dalam masyarakat serta memancarkan sosok pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (kalau pemerintah pasca reformasi memberi kesan sama korupnya dengan yang sebelum, masyarakat akan tenggelam dalam kekecewaan dan masa depan bangsa betul-betul dalam bahaya).

selama ribuan tahun atas nama agama, orang saling mendiskriminasi, memperbudak, menindas, menyiksa, membunuh, mempersetankan, memfitnah atas nama agama. Agama tidak jarang menjadi tandon kebodohan, prasangka, kebencian, kesombongan, pandangan menghina dan sok lebih suci yang sebagai itu legitimasi kekejaman terhadap orang lain, baik sebagai individu, maupun sebagai kelompok.

Sejarah penuh salah paham sampai salah memerangi itu kemudian masuk ke dalam ceritera-ceritera yang diteruskan dari abad-ke abad dan sudah merusak suasana sebelum orang dari agama berbeda bertemu. Maka banyak sikap negatif dalam hubungan antar agama yang sampai hari ini masih dapat ditemukan. Seperti misalnya:

- Eksklusivisme dalam ajaran, bukan hanya menyangkut keyakinan akan kebenaran ajarannya sendiri yang wajar, melainkan yang tidak mampu melihat adanya kebaikan-kebaikan yang nyata-nyata ada dalam umat beragama lain serta tanda-tanda lain yang diberikan Allah bahwa adanya beberapa agama memang tidak di luar kehendakNya.
- Eksklusivisme praktis dengan melarang umat sendiri bergaul dengan orang beragama lain, mengajar anak-anak sendiri bahwa anak-anak beragama lain perlu dicurigai dan hal-hal seperti itu.

- **Hasutan terhadap agama-agama lain, menceritakan hal-hal jelek tentangnya, menanamkan kebencian, mengembangkan prasangka-prasangka dan kecurigaan.**
- **Memaksakan agamanya sendiri pada umat beragama lain, atau memakai cara-cara tidak wajar dalam penyebaran agamanya sendiri, mendesakkan diri pada penganut agama lain yang tidak menyatakan ingin diajar, memanfaatkan kelemahan umat beragama lain, entah kekurangan dalam pendidikannya, entah kelemahan fisik untuk membujuk dlsb.**
- **Ketidaksediaan untuk menghormati hak setiap orang untuk beragama menurut apa yang diyakininya sendiri merupakan kehendak Allah.**

Kalau kita menempatkan sikap-sikap seperti itu ke dalam konteks komunalisme, maka bisa dimengerti bahwa konflik-konflik komunalistik apabila pecah kemudian bertambah gawat karena diperkuat oleh kebencian dan prasangka-prasangka yang memang sudah terdapat antara umat beragama. Agama-agama seakan-akan mempersiapkan lahan di mana bunga api konflik komunalistik – misalnya karena provokasi – mudah menciptakan kebakaran luas.

3. AGAMA YANG BERPERIKEMANUSIAAN

Situasi di mana agama-agama yang seharusnya menjadi tanda keselamatan Ilahi, jadi tanda kebaikan, keadilan dan perdamaian di antara umat manusia, menjadi salah satu sumber kejahatan menurut saya menuntut agar kita mengadakan refleksi kembali ke apa yang sebenarnya dikehendaki Allah dengan memberikan agama kepada manusia. Refleksi itu sudah tentu harus dilakukan oleh masing-masing agama menurut dalil-dalilnya.

Akan tetapi, kiranya jelas juga bahwa cara berpikir tradisional yang secara naif bertolak semata-mata dari dalil masing-masing tidak mencukupi. Dewasa ini ada kesadaran yang semakin meluas dalam umat manusia, hasil kekejian-kekejian abad ke-20 yang masih terus berlangsung, yang menuntut bahwa segenap teori dan agama yang mau diakui harus membuktikan diri tegas-tegas berperikemanusiaan.

Contoh sikap itu adalah Karen Armstrong dengan bukunya *"A History of God"*. Secara singkat, Armstrong mengatakan bahwa agama-agama dan keagamaan pada umumnya, hanyalah *credible*, hanyalah mutu apabila tegas-tegas menolak kekejaman, bersikap terbuka dan positif terhadap siapa saja –hal mana tidak berarti harus melepaskan klaim kebenaran– dan menyingkirkan kekerasan dari di antara sarana-

sarananya. Dengan lain kata: Beragama berarti harus berperikemanusiaan. Atau, sebaliknya, agama yang tidak berperikemanusiaan, sudah kehilangan harkatnya dan tinggal kulitnya saja. Hanya keagamaan merupakan unsur positif pada manusia.

Mari kita bertanya: Apa itu "perikemanusiaan"? Perikemanusiaan dipahami pertama-tama sebagai sebuah *keyakinan etis* yang secara langsung mengandung sikap etis praktis yang sesuai. Yaitu keyakinan bahwa setiap orang harus dihormati sebagai persona, sebagai manusia dalam arti sepenuhnya, bukan karena ia pintar atau bodoh, baik atau buruk, dan dengan tidak tergantung dari –daerah asal-usulnya, komunitas etnik atau umat beragama mana, dan apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. Berperikemanusiaan berarti menghormati orang lain dalam identitasnya, dengan keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, cita-cita, ketakutan-ketakutan dan kebutuhan-kebutuhannya. Dia itu seorang manusia dan hal itu sudah cukup alasan agar saya menghormatinya dalam identitas personalnya sebagai manusia. Perikemanusiaan berarti perspektif di mana hormat dasar yang diberikan kepada orang lain tidak tergantung dari ciri-ciri atau kemampuan-kemampuannya, melainkan semata-mata dari kenyataan bahwa dia seorang manusia.

Sikap ini mencakup keyakinan bahwa (dengan mengutip Richard Rorty) "hal paling buruk yang dapat kita lakukan terhadap orang lain adalah kekejaman". Dengan alasan apa pun, dalam situasi apa pun kekejaman tak pernah dapat dibenarkan. Berperikemanusiaan berarti merasa ngeri terhadap kekejaman. Tidak bersikap kejam berarti: Tak pernah membuat orang lain merasa sakit kecuali mereka memberikan hak untuk berbuat demikian (misalnya kepada dokter gigi), dengan tidak melukai dia secara fisik maupun merendahkan dia secara psikologis. Yang penting bagi seorang humanis: Tidak perlu ada alasan teoretis untuk tidak bersikap kejam. Bahwa bersikap kejam merupakan perbuatan perbuatan paling jahar adalah jelas dengan sendirinya.

Berperikemanusiaan berarti solidaritas berprinsip dengan orang lain apa pun dia itu. Berperikemanusiaan berarti sikap yang baik, peka terhadap kenyataan bahwa orang lain mudah terluka. Berperikemanusiaan berarti kemampuan untuk ikut merasakan dengan melintas sekat-sekat primordia dan sosial lain. Berperikemanusiaan berarti penolakan terhadap ketidakadilan: Perlakuan tidak adil tak pernah dapat beres, dan hal itu berlaku juga terhadap orang asing atau komunitas-komunitas di luar komunitas kita, bahkan terhadap musuh-musuh kita. Berperikemanusiaan berarti *fairness* dan cinta pada keadilan.

Rupa-rupanya perikemanusiaan tidak dapat membedakan antara orang beragama dan tidak beragama. Semua harus diperlakukan dengan baik dan *fair*, entah apa kepercayaan mereka. Maka masalahnya bukan apakah kita ini humanis religius atau humanis bukan religius, melainkan apakah kita humanis. Apabila kita humanis, kita akan menerima orang lain dari segala kepercayaan dan keyakinan religius sebagai orang yang peka, mudah terluka, yang menjadi beban tanggungjawab kita apabila kita bertemu dengan mereka. Jadi perikemanusiaan adalah keyakinan mendalam bahwa saya harus memperlakukan setiap orang sebagai pribadi dengan tidak melukainya, dengan menawarkan kepadanya sejauh saya mampu solidaritas saya, dengan memasukkannya ke dalam lingkungan mereka yang saya yakini selalu harus diperlukan secara adil, *fair*, dan penuh kebaikan.

Kiranya sangat tepat bahwa orang maupun lembaga-lembaga yang menganggap diri terlibat pada agama berdiri di garis depan perjuangan demi perikemanusiaan. Tanpa kekecualian dan syarat-syarat mereka harus berusaha membuat masyarakat menjadi tempat di mana *setiap warga masyarakat*, tanpa membedakan apakah ia termasuk umatku sendiri atau umat lain, apakah itu menganut agama "yang benar" atau tidak, bisa hidup sesuai dengan harkatnya sebagai manusia.

Bagi saya perikemanusiaan merupakan kriteria kesejatan agama. Agama, atau ajaran-ajaran agama yang membenarkan perlakuan kejam terhadap makhluk-makhluk perasa lain, yang menyebabkan rasa sakit atau menghina orang lain karena alasan keagamaan, misalnya untuk "membela agama yang benar", dalam pandangan saya kehilangan harkatnya. Perlakuan tidak manusiawi, kekejaman atas nama Allah, bagi saya menjijikkan. Saya menganggapnya sebagai penghinaan Allah. Saya sangat sadar bahwa selama sejarah, sampai hari ini, ada orang dianiaya, disiksa, ditembak, dibakar atau dibunuh dengan pedang atas nama hukum agama atau ajaran agama yang benar. Ini sebuah salah paham mengerikan tentang apa itu agama sebenarnya. Hal itu sebuah perversi kehendak Allah. Adalah karena kebutaan manusia, kekerasan hatinya dan kesombongannya bahwa hal-hal seperti itu terjadi. Apa yang pernah dilakukan dalam kebutaan itu tidak dapat ditiadakan lagi. Tetapi sekarang, di mana di negara kita orang masih dihina, ditindas dan dibunuh atas nama agama kita harus menarik garis. Tak ada itu keagamaan sejati tanpa perikemanusiaan. Orang-orang beragama dari semua kepercayaan dan agama harus berdiri bersatu dalam ketekatan untuk menolak segala kelakuan tidak manusiawi dan kejam atas nama agama.

4. PERTOBATAN NYATA

Agar agama-agama menjadi perintis kehidupan bersama yang betul-betul berperikemanusiaan yang diperlukan tak kurang dari suatu pertobatan para tokoh agama sendiri. Dari memandang agama lain pertama-tama sebagai musuh dan saingan, mereka perlu bersedia memandang agama lain sebagai jalan bagi umat masing-masing yang meskipun berbeda-beda namun tidak mungkin ada di dunia di luar kehendak Sang Pencipta. Hal itu tidak berarti bahwa kita menganggap semua agama sama saja, melainkan bahwa kita bersedia menerima keberadaan serta menghormati kehidupan umat beragama lain meskipun kita tidak sependapat dan sekepercayaan dengan mereka. Hal itu mengandaikan bahwa kita bersedia membersihkan hati kita sendiri dari emosi-emosi yang tidak baik, dari rasa benci dan dendam, dari prasangka-prasangka yang barangkali sudah lama kita bawa. Ke luar dari sikap yang negatif ke sikap yang positif sangat tidak gampang, tetapi bagaimana kita dapat mengharapkan toleransi dan perdamaian dalam masyarakat majemuk kalau para tokoh dan panutan agama sendiri tidak memeloporinya?

Untuk ke luar dari sikap yang negatif amatlah perlu dijalin jalur-jalur komunikasi di semua tingkat. Tidak hanya di pusat atau antara kaum intelektual, melainkan di tingkat "akar rumput", dalam masyarakat di kampung dan di desa-desa. Dengan

saling mengenal banyak prasangka akan berkurang, barangkali hilang. Jalur komunikasi itu dipergunakan untuk membicarakan secara terbuka dan dalam suasana saling percaya hal-hal yang masih menggajal dalam hubungan antar umat, apa yang bisa menjadi sumber konflik.

Secara lebih konkret berikut ini beberapa saran untuk dipikirkan bersama-sama:

- Kita harus mengakhiri bahasa hasutan di antara kita, harus berhenti bicara jelek satu tentang yang lain, juga dalam lingkungan umat/saudara seagama sendiri.
- Cara-cara penyebaran agama yang agresif - mendekati orang tanpa diminta - harus dihentikan. Di sini termasuk pemakaian paksaan, bujukan, pemanfaatan kekurangan pendidikan dan lain cara yang tidak wajar untuk menyebarkan agamanya sendiri. Bahkan jangan mendatangi orang yang sudah beragama dan diajak pindah agama.
- Namun sebaliknya berlaku juga: Meskipun hal itu dapat menyakiti perasaan kita, namun kita harus bersedia menerima, bahwa setiap orang berhak - sebuah hak yang sangat asasi dan sungguh-sungguh harus dihormati – mengikuti agama yang diyakini, termasuk kalau itu berarti ia memutuskan pindah agama.

- Kita perlu bersedia menerima pluralitas bangsa, artinya menerima bahwa cara hidup bersama dan sistem hukum yang mendasarinya, dapat diterima oleh semua komponen bangsa.
- Hendaknya para pimpinan dan panutan umat beragama yang merupakan mayoritas di suatu wilayah mengajak umat mereka agar selalu merasa bertanggungjawab atas keamanan, keselamatan dan rasa diterima sepenuhnya umat beragama minoritas.
- Umat-umat yang merupakan minoritas menjawab sikap mengayomi umat mayoritas dengan membangun rasa peka terhadap perasaan mayoritas sehingga menghindari dari kelakuan dan bentuk-bentuk ekspresi yang terasa provokatif bagi umat mayoritas. D.k.l.; perlu dibangun dan dilatih tenggang rasa dari semua umat beragama.
- Tentang dua hal yang masih mengganggu hubungan antar umat mesti bisa tercapai suatu saling pengertian dan pemecahan yang dapat diterima oleh semua, yaitu dalam hal hak minoritas untuk membangun rumah ibadah dan dalam hal pemberian pelajaran agama menurut keinginan orangtua di sekolah swasta milik yayasan berorientasi agama.
- Akhirnya satu hal juga ingin disebutkan di sini: Fatwa MUI beberapa tahun lalu yang melarang umat Islam mengucapkan selamat hari raya kepada warga agama lain perlu

diberi penafsiran yang lebih sesuai dengan semangat persaudaraan dan persatuan bangsa.

PENUTUP

Akhirnya yang perlu adalah bahwa umat beragama, dan pertama-tama para tokoh, pimpinan, panutan, pimpinan organisasi beragama mau membuka hati terhadap kebaikan yang justru diajarkan oleh agama masing-masing. Perlu kita menerima pluralitas bangsa Indonesia dalam hal bahasa ibu, agama, suku, budaya dan lain-lain. Perlu kita hormati dan kita terima baik bahwa memang ada perbedaan cara hidup, berpesta dan beragama di antara kita. Kita harus berpegang pada keyakinan bahwa beragama berarti selalu dan tanpa kecuali membawa diri secara beradab, menolak kekerasan dan segala paksaan dalam mengusahakan keyakinan-keyakinan agama kita, bahkan terhadap umat kita sendiri. Perlu kita bangun perasaan lapang hati di satu pihak, di lain pihak semangat kebangsaan yang dapat mempersatukan kita satu usaha bersama untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil, beradab dan sejahtera. ■